



Revisi 2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



POLITEKNIK AKA BOGOR

Jl. Pangeran Sogiri No 283 Tanah Baru Bogor

Telp. 0251-8650351

Fax. 0251-8650352

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Politeknik AKA Bogor (Renstra Politeknik AKA Bogor) disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi Politeknik AKA Bogor untuk menyusun program tahunan, dan juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program. Renstra Politeknik AKA Bogor disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Setiap tahun renstra Politeknik AKA Bogor direviu agar sesuai dengan perkembangan yang ada. Pada tahun 2021 ini maka disusunlah Renstra Politeknik AKA Bogor Revisi 2.

Dengan adanya renstra Politeknik AKA Bogor revisi 2 ini diharapkan program pengembangan Politeknik AKA Bogor lebih terarah. Para pimpinan Kementerian dapat menjadikan renstra ini sebagai acuan dalam pengalokasian dana untuk Politeknik AKA Bogor dan juga sebagai acuan dalam penilaian kinerja Politeknik AKA Bogor. Renstra Politeknik AKA Bogor bersifat dinamis, dalam arti dapat dievaluasi dan direvisi apabila tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, pimpinan Politeknik AKA Bogor berharap kepada pihak yang berwenang untuk dapat memberikan masukan untuk perbaikan renstra ini.

Pada kesempatan ini pimpinan Politeknik AKA Bogor mengucapkan terima kasih kepada para anggota senat atas partisipasi dan masukan pada saat penyusunan renstra ini.

Bogor, Desember 2021

Direktur Politeknik AKA Bogor,



Henny Rochaeny, M.Pd.
NIP. 196406041990032003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan | 5 |
| BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK AKA BOGOR | 12 |
| 2.1. Visi Politeknik AKA Bogor | 12 |
| 2.2. Misi Politeknik AKA Bogor | 13 |
| 2.3. Tujuan Politeknik AKA Bogor | 15 |
| 2.4. Sasaran Kegiatan Politeknik AKA Bogor | 16 |
| BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 19 |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik AKA Bogor..... | 19 |
| 3.2. Kerangka Regulasi | 22 |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan | 23 |
| BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 25 |
| 4.1. Target Kinerja | 25 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan | 27 |
| BAB V. PENUTUP | 28 |
| LAMPIRAN..... | 29 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia | 4 |
| Tabel 2. Kerangka Regulasi Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024 | 23 |
| Tabel 3. Target Kinerja Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024 | 25 |
| Tabel 4. Kerangka Pendanaan Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024 | 27 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar 1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3/2014 Perindustrian | 1 |
| Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN | 2 |
| Gambar 3. Bangunan Industri Nasional | 3 |
| Gambar 4. Populasi Indonesia di ASEAN | 6 |
| Gambar 5. Peta Strategi Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024 | 16 |
| Gambar 6. Kerangka Kelembagaan Politeknik AKA Bogor | 24 |

DAFTAR LAMPIRAN

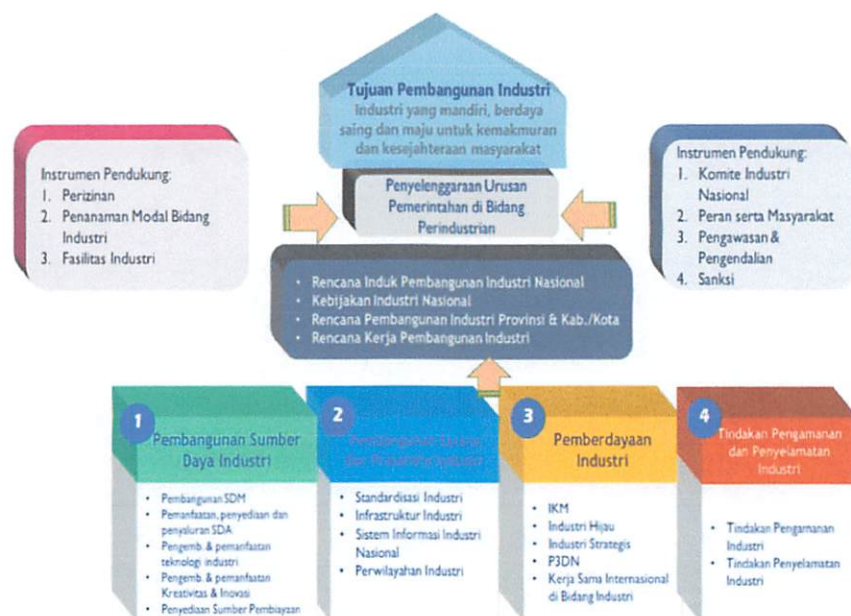
| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Pohon Kinerja Politeknik AKA Bogor 2020-2024 | 30 |
| Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Politeknik AKA Bogor..... | 31 |
| Lampiran 3. Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis..... | 34 |
| Lampiran 4. Pedoman Kinerja Renstra Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024. | 38 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pembangunan Industri Nasional

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3/2014 Perindustrian). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Maju 2030. Arah dan kebijakan pembangunan industri sesuai UU No. 3/2014 Perindustrian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3/2014 Perindustrian

Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

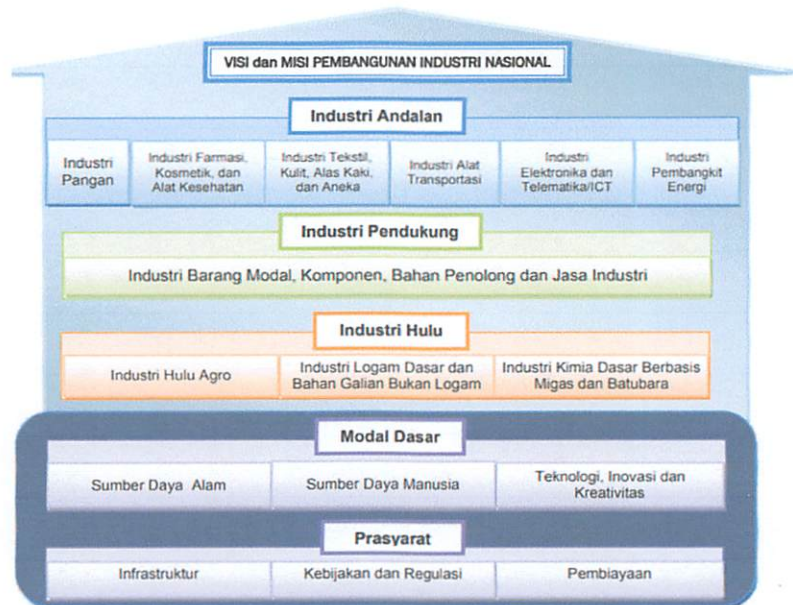
Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia. Arah dan kebijakan pembangunan industri dalam RIPIN dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN
Sumber: PP No. 14/2015 RIPIN 2015-2035

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap, yaitu Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan Sumber Daya Manusia/SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020-2024. RIPIN bertujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Untuk mencapai RIPIN maka disusun bangun industri nasional. Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, yang memerlukan modal dasar dan prasyarat seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Bangun Industri Nasional
Sumber: PP No. 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

Di sisi yang lain, seiring dengan perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri 4.0 muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 di mana penerapan Industri 4.0 merupakan salah satu *major project* Pemerintah. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, yang diharapkan akan menarik investasi di bidang industri, karena industri di Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi.

1.1.2. Pembangunan SDM Industri

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, terdapat 140,15 juta angkatan kerja dari 206,71 juta

penduduk usia kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 131,05 juta penduduk bekerja, tetapi 87,25% berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,49%. Struktur demografi penduduk Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia

| Usia* | Jumlah (%) | Pria (orang)** | Wanita (orang)** |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 0 – 14 tahun | 21,69 | 33.922,9 | 23.263,4 |
| 15 – 24 tahun | 16,98 | 23.033,3 | 21.744,3 |
| 25 – 54 tahun | 45,50 | 60.575,8 | 59.412,4 |
| 55 – 64 tahun | 9,16 | 12.020,8 | 12.128,7 |
| ≥ 65 tahun | 6,67 | 8.318,5 | 9.262,6 |

*usia produktif ditandai dengan huruf tebal dan warna latar berbeda

** dalam ribu orang

Sumber: BPS 2021, diolah oleh Politeknik AKA Bogor

Melihat realitas yang terjadi dalam upaya pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030, terutama untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN dan bonus demografi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 atau peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

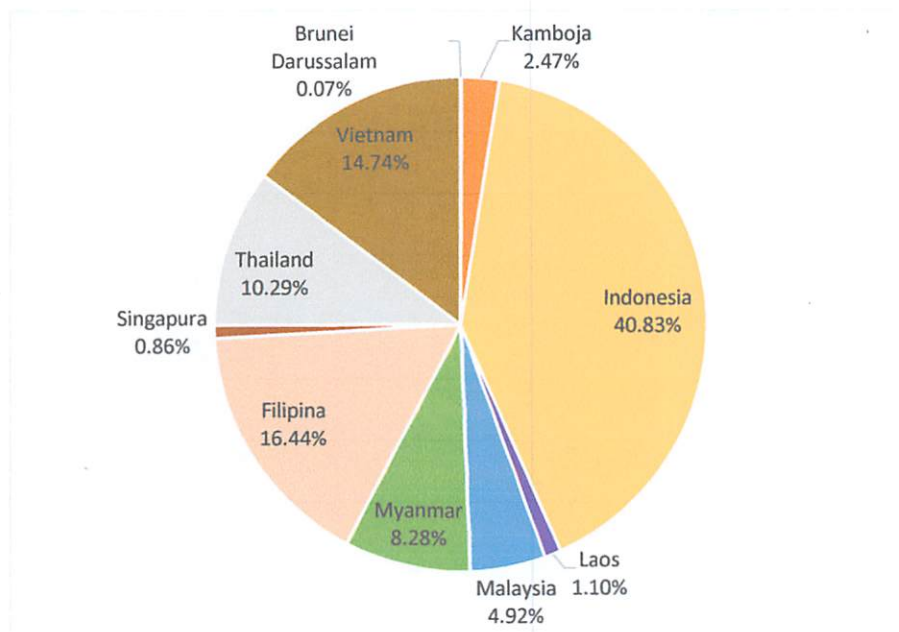
Hambatan pengembangan SDM di Indonesia dilandasi oleh tiga hal pokok yang tidak dapat dihindari, yaitu: *pertama*, liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. *Kedua*, sistem pendidikan yang tidak *link and match*, artinya pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas, bukan pada keterampilan. *Ketiga*, pembangunan SDM tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.

Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu, belum adanya peta jalan pengembangan SDM dan visi misi yang jelas dalam RPJPN 2004-2025, serta pemerintah belum mampu meningkatkan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah secara signifikan. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari 250 juta lebih penduduk Indonesia, sekitar 35 juta penduduk merupakan masyarakat miskin. Di sisi lain, hanya 3,78% penduduk yang berpendidikan S3, sementara penduduk yang berpendidikan SD mencapai 33% penduduk.

Oleh karena itu, untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru. Reformasi di bidang pendidikan semakin penting, terutama dengan mendorong pendidikan murah, reformasi sistem pendidikan yang *link and match* dan job, serta pengajaran budi pekerti. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula pengelolaan iklim tenaga kerja, revitalisasi pendidikan dan latihan SDM, pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik, pengembangan regulasi tenaga kerja, dan perbaikan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas program pembangunan nasional. Solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Salah satu keunggulan Indonesia adalah bonus demografi yang besar. Berdasarkan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas (2015), bonus demografi Indonesia akan mencapai puncak pada tahun 2025. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Populasi Indonesia di ASEAN dapat dilihat pada Gambar 4. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran.



Gambar 4. Populasi Indonesia di ASEAN

Sumber: ASEAN *Statistical Yearbook* 2021, diolah Politeknik AKA Bogor

Merujuk pada RIPIN 2015-2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Oleh karena itu, target pembangunan SDM industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri adalah rata-rata 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Demi tercapainya target tersebut, BPSDMI bertugas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri. Namun demikian, keadaan di lapangan masih menunjukkan bahwa lembaga diklat dan lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum mampu memenuhi kapasitas pelatihan dan sertifikasi sebanyak itu per tahunnya.

Di sisi yang lain, globalisasi menambah kompleksitas perkembangan pengembangan tenaga kerja industri. Menurut ASEAN *Framework on Service Agreement* (AFAS), perdagangan jasa di ASEAN dapat dilakukan dengan empat cara, atau dikenal dengan *four modes*. Cara ke-4 atau Mode 4 mengacu kepada “*movement of natural persons*”, yaitu kehadiran tenaga kerja profesional asing di suatu negara untuk memberikan layanan jasanya. Dengan kata lain, Mode 4 merupakan suatu cara perdagangan jasa dengan cara menghadirkan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya keras membatasi hal tersebut, namun globalisasi merupakan sebuah gelombang besar yang tidak dapat terbendung lagi.

Saat ini, dampak globalisasi Mode 4 yang paling relevan dengan Indonesia adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat. Semangat yang dibawa oleh MEA adalah “*transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital*”. Dengan semangat tersebut, perpindahan tenaga kerja antarnegara anggota ASEAN akan menjadi semakin cepat. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar para pencari kerja. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, harus mempersiapkan suatu mekanisme peningkatan kompetensi SDM industri untuk menghadapi persaingan tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerja sama dalam MEA adalah mengenai “*recognition of professional qualification*” atau pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja profesional. Pengakuan ini diakomodasi melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services*. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodasi MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan *National Qualification Framework (NQF)* milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Sejak masa awal pandemi hingga saat ini, upaya peningkatan produktivitas di sektor industri dalam telah dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut diharapkan dapat memacu peningkatan utilitas dan memulihkan produktivitas, serta membuka kesempatan kerja dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didukung dengan transformasi ekonomi dan perubahan sosial, salah satunya dengan dukungan teknologi digital yang meningkatkan efisiensi kerja. Ke depannya, prioritasasi pada upaya penanganan dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan melanjutkan *trend* perkembangan yang positif ini.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah juga telah mengambil beberapa inisiasi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Inisiatif pertama adalah upaya implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program substitusi impor hingga 35% pada 2022 melalui penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi. Target substitusi impor dapat dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui pemberlakuan kewajiban bagi Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP mencapai 40% seperti diatur dalam Pasal 61 PP No.29 tahun 2018. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan TKDN yang sebelumnya cenderung bersifat *inward looking*, diarahkan agar berspektrum luas/*outward looking* dengan perspektif P3DN sebagai fasilitator.

Terkait pendidikan vokasi, di Indonesia pendidikan vokasi sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu dan berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perannya dalam pembangunan kualitas tenaga kerja relatif kecil dibandingkan dengan pendidikan umum (akademik). Pasokan tenaga kerja terdidik sebagian besar merupakan lulusan pendidikan akademik atau pendidikan umum. Di antara tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah atas, hanya 35% yang merupakan lulusan SMK. Di antara tenaga kerja berpendidikan tinggi, hanya 25% lulusan program diploma dan politeknik. Komposisi pasokan tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih berminat mengikuti pendidikan akademik daripada pendidikan vokasi. Untuk itu, pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, baik politeknik/akademi komunitas maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu meningkatkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan pendidikan akademik.

Politeknik AKA Bogor merupakan salah satu unit Pendidikan Tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian di bawah koordinasi BPSDMI. Sebagai unit pendidikan Politeknik AKA Bogor memiliki potensi sebagai berikut :

1. Organisasi dan Kelembagaan

- Politeknik AKA Bogor telah memiliki sertifikat akreditasi institusi dengan peringkat Baik Sekali
- Politeknik AKA Bogor memiliki tiga program studi Diploma 3 yaitu Analisis Kimia, Penjaminan Mutu Industri Pangan (PMIP) dan Pengolahan Limbah

Industri (PLI). Program studi Analisis Kimia terakreditasi A, program studi PMIP terakreditasi B, program studi PLI terakreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

- Politeknik AKA Bogor memiliki satu program studi baru yaitu Diploma 4 Nanoteknologi pangan. Program studi Diploma 4 Nanoteknologi pangan adalah satu-satunya di Indonesia.
- Program studi Penjaminan Mutu Industri Pangan dan Pengolahan Limbah Industri telah menerapkan pendidikan *dual system*.
- Sistem manajemen Politeknik AKA Bogor juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.
- Politeknik AKA Bogor telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan berdasarkan Badan Layanan Umum.
- Laboratorium Uji Politeknik AKA Bogor telah tersertifikasi berdasarkan ISO 17025:2017 pada tahun 2019 dari Komite Akreditasi Nasional.
- Sudah melaksanakan uji kompetensi mahasiswa di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Sudah menghasilkan lulusan setara D1 yang siap bekerja di perusahaan bekerja sama dengan asosiasi dan industri
- Telah tersertifikasi internasional (Belanda) sesuai dengan kualifikasi *CREBO 25463 Level 4 Nutrition and Quality Specialist* untuk mahasiswa program studi PMIP
- Telah menerapkan kurikulum industri 4.0
- Didukung oleh tenaga dosen yang profesional dan kompeten di bidangnya.

2. Jejaring dengan Stakeholder

Politeknik AKA Bogor memiliki lebih dari 8.000 alumni yang tersebar di berbagai industri baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian dari alumni telah menempati posisi kunci di industri, institusi, lembaga pemerintahan dan laboratorium pengujian. Kondisi ini merupakan potensi untuk menjalin hubungan yang baik mengembangkan Politeknik AKA Bogor.

3. Sarana dan Prasarana

Politeknik AKA Bogor memiliki tanah seluas 19.900 m², fasilitas berupa bangunan gedung administrasi, gedung perkuliahan, gedung olah raga dan gedung

laboratorium yang terdiri dari Laboratorium Kimia Analitik dan Organik, Laboratorium Fisika dan Instrumentasi, Laboratorium Lingkungan, Laboratorium Pangan dan Mikrobiologi, Laboratorium Terintegrasi (Tempat Uji Kompetensi dan Laboratorium Sensorik), Laboratorium Nanoteknologi Pangan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Pengujian yang telah dilengkapi dengan peralatan yang modern sesuai dengan kebutuhan industri. Laboratorium uji Politeknik AKA Bogor juga dilengkapi dengan *Laboratory Information Management System* (LIMS).

Potensi tersebut merupakan modal bagi Politeknik AKA Bogor untuk menghasilkan lulusan yang *link and match* dengan kebutuhan industri. Selain potensi, Politeknik AKA Bogor juga memiliki beberapa hambatan, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Politeknik AKA Bogor saat ini memiliki 1200 mahasiswa, 79 dosen, 6 orang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), 3 orang laboran, dan untuk tenaga administrasi yang bertugas memfasilitasi kebutuhan pegawai dan mahasiswa hanya berjumlah 21 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga administrasi maka beberapa dosen dilibatkan di bagian administrasi.

2. Sistem Informasi

Sistem informasi pada Politeknik AKA Bogor sudah terbangun namun belum optimal dalam penggunaannya. Hal ini merupakan masalah bagi Politeknik AKA Bogor karena pada saat ini penggunaan sistem informasi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebijakan industri 4.0. Disamping itu sistem informasi ini juga merupakan rujukan bahan pembelajaran bagi mahasiswa.

3. Sarana dan Prasarana

Politeknik AKA Bogor memiliki 7 gedung berlantai 3. Namun, ada 4 gedung yang berusia hampir 20 tahun sehingga membutuhkan perbaikan. Selain itu, Politeknik AKA Bogor belum memiliki *show case* dan *miniplant industry 4.0* untuk mendukung pembelajaran terkait industri 4.0.

Menghadapi potensi dan permasalahan seperti disebutkan di atas, Politeknik AKA Bogor perlu secara strategis menajamkan perencanaan pembangunan SDM industri dalam Renstra Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024 untuk memastikan bahwa agenda pembangunan SDM Industri khususnya di bidang kimia dan terapannya

dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan-kebijakan strategis di lingkungan Politeknik AKA Bogor akan berdampak pada tercapainya pemanfaatan potensi dan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi setiap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Di sisi yang lain, implementasi kebijakan strategis yang tidak berjalan secara efektif akan berdampak pada terjadinya stagnasi dan bahkan kemunduran performa bidang perindustrian di Indonesia.

Politeknik AKA Bogor sebagai unit pendidikan tinggi vokasi di bawah BPSDMI mempunyai tugas menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang kimia dan terapannya. Renstra Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK AKA BOGOR

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, maka disusun visi dan misi Politeknik AKA Bogor yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Politeknik AKA Bogor sebagai perguruan tinggi di bawah pembinaan BPSDMI, maka visi dan misi Politeknik AKA Bogor juga diturunkan dari visi dan misi BPSDMI.

2.1. Visi Politeknik AKA Bogor

Visi dan misi BPSDMI disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Kemenperin dengan tugas dan fungsi BPSDMI, serta kondisi SDM industri yang ingin dicapai pada akhir 2024, seperti yang termaktub di dalam buku *Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju “Corporate University” BPSDMI Kementerian Perindustrian*. Selain itu, penyusunan visi dan misi BPSDMI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari *stakeholders* terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka visi BPSDMI adalah “Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”

Politeknik AKA Bogor sebagai unit pendidikan tinggi vokasi di bawah BPSDMI harus mendukung visi BPSDMI. Oleh karena itu, visi Politeknik AKA Bogor adalah **“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang kimia dan terapannya pada tahun 2030”**. Visi ini menggambarkan tekad dan komitmen pimpinan serta seluruh staf Politeknik AKA Bogor untuk dapat menghasilkan SDM industri tingkat ahli bidang kimia dan terapannya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, serta dapat menjadi mitra industri yang inovatif. Kata ‘unggul (*excellence*)’ dalam visi tersebut memiliki makna Politeknik AKA Bogor selain menghasilkan lulusan di bidang kimia dan terapannya juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa. Dengan adanya uji kompetensi tersebut mahasiswa memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan program studi masing-masing sehingga menjadi nilai lebih bagi seorang lulusan. Sedangkan kata ‘berdaya saing global’ bermakna Politeknik AKA Bogor telah

melakukan sertifikasi internasional bagi mahasiswa yang akan lulus dan juga mempersiapkan akreditasi internasional. Visi tersebut dibuat bersama dengan *stakeholder* (BPSDMI, Industri, Alumni dan Tenaga Ahli), sehingga dapat memenuhi kepentingan *stakeholder*. Visi harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika Politeknik AKA Bogor.

2.2. Misi Politeknik AKA Bogor

Untuk mewujudkan visi BPSDMI, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

1. *Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;*
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai *Center of Excellences* pembangunan tenaga kerja industri;
4. *Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan ecosystem center industri 4.0;*
5. *Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;*
6. Membangun *Digital ASN Talent Pool and Knowledge Management Center* sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri;
7. Membangun pusat pengembangan (*development center*) infrastruktur kompetensi industri;
8. Membangun wadah (*hub center*) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Dari 8 misi BPSDMI, maka dalam rangka mewujudkan visi Politeknik AKA Bogor, misi yang diemban oleh Politeknik AKA Bogor adalah :

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi industri *dual system* dengan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global;
- b. melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri prioritas;
- c. melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM);

- d. mengembangkan kompetensi transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai Satelit Pusat Inovasi Digital Industri (PIDI);
- e. membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan stakeholder terkait;
- f. mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi; dan
- g. mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

Secara luas, misi ini menggambarkan input, proses, dan output dalam sistem pendidikan. Input meliputi calon mahasiswa, kurikulum, dosen, peralatan pendidikan dan pengajaran, laboratorium, prasarana dan sarana fisik, serta tenaga dan sarana penunjang lainnya. Proses adalah hal-hal yang menyangkut sistem pendidikan, situasi kerja yang kondusif, teknologi komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi di bidang terapan analisis kimia, serta sistem pengawasan dan pengendalian. Input yang baik serta proses pendidikan yang sesuai dengan mekanisme akan diperoleh output SDM industri tingkat ahli di bidang terapan analisis kimia yang kompeten serta berdaya saing tinggi.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan dan melaksanakan misi Politeknik AKA Bogor diperlukan adanya nilai-nilai yang harus dimengerti dan tertanam dalam diri setiap pegawai Politeknik AKA Bogor, serta dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Politeknik AKA Bogor memiliki 140 pegawai dengan latar belakang nilai budaya dan tingkat/spesialisasi pendidikan yang beragam. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Politeknik AKA Bogor adalah sebagai berikut :

1. Integritas

Pegawai Politeknik AKA Bogor memiliki integritas dalam berpikir, bertutur kata, berperilaku dan bertindak dengan konsisten yang dilandasi dengan kode etik serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Perilaku utama pegawai yang memiliki integritas adalah bertindak dengan konsisten yang dilandasi dengan norma dan kode etik profesi; serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan transparan

2. Profesional

Pegawai Politeknik AKA Bogor bekerja secara profesional, tuntas dan akurat didasarkan kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen

yang tinggi. Perilaku utama dari profesionalitas adalah bekerja dengan kualifikasi teknis berdasarkan standar profesi dan prosedur baku.

3. Produktif

Pegawai Politeknik AKA Bogor memiliki nilai produktif dalam bekerja secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil kerja yang bermanfaat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perilaku utama dari nilai produktif adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai kinerja yang maksimal.

4. Kompetitif

Pegawai Politeknik AKA Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki daya saing, keunggulan serta berguna baik bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara. Nilai kerja ini terpancar dari perilaku utama yang dimiliki yakni bersikap dan berperilaku untuk menjadi yang terbaik, serta mengedepankan keunggulan atau keunikan yang dimilikinya dalam menghadapi persaingan.

5. Inovatif

Pegawai Politeknik AKA Bogor senantiasa berupaya melakukan berbagai penyempurnaan yang memiliki nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan sebagai solusi alternatif guna mempermudah proses kerja yang lebih baik, cepat dan tepat. Perilaku utama dari nilai kerja inovatif adalah selalu melakukan perbaikan proses dan cara kerja secara berkesinambungan, serta mengembangkan ide baru, alternatif atau kreasi dalam meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

6. Pelayanan Prima

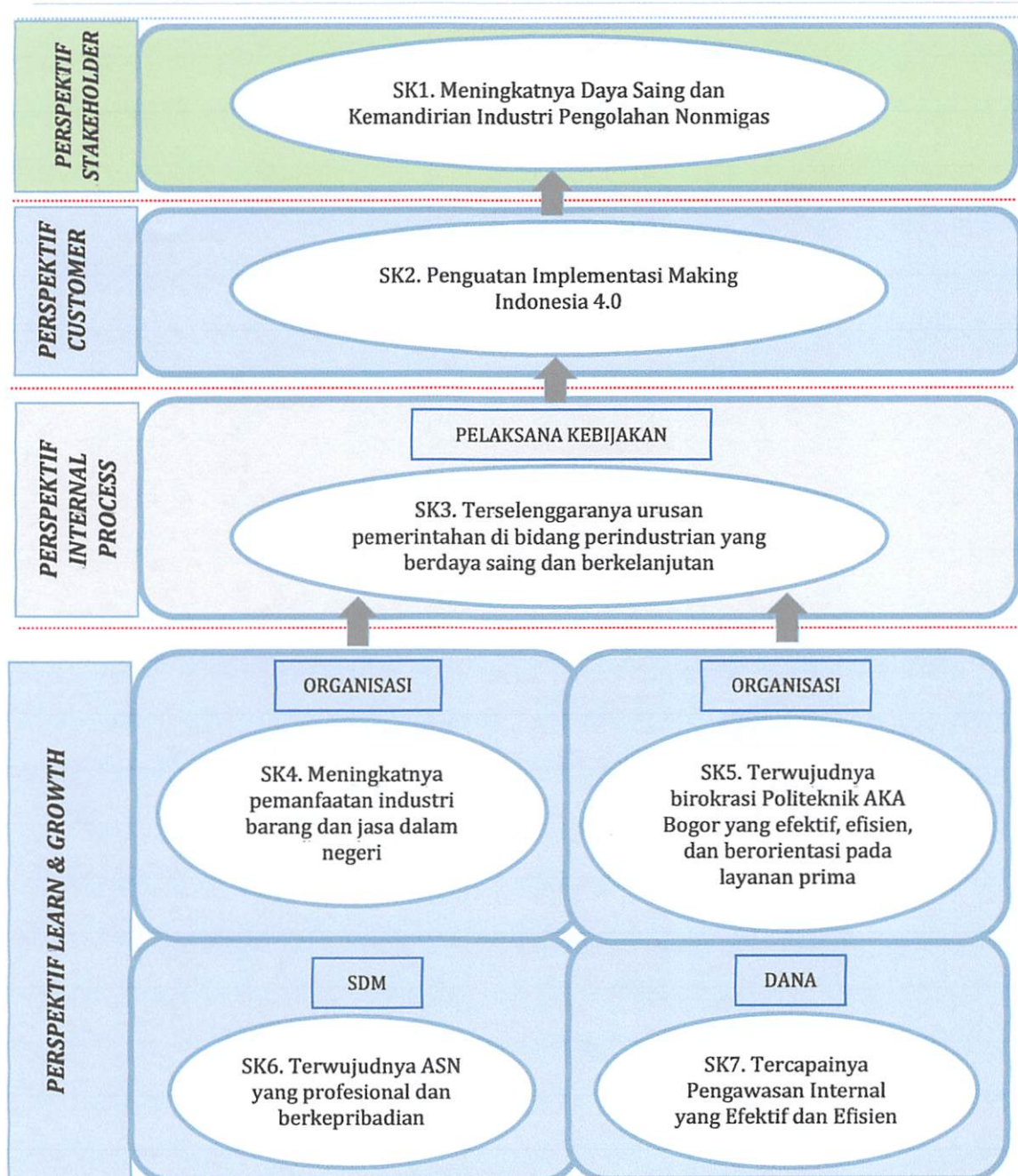
Pegawai Politeknik AKA Bogor senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (*stakeholder*).

2.3. Tujuan Politeknik AKA Bogor

Tujuan BPSDMI 2020 – 2024 adalah “Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Politeknik AKA Bogor menetapkan tujuan strategis 5 (lima) tahun ke depan yang juga diturunkan dari tujuan BPSDMI yaitu “**Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional**”. Pencapaian tujuan ini secara khusus akan dipantau melalui indikator kinerja tujuan yang dijabarkan pada Bab IV.

2.4. Sasaran Kegiatan Politeknik AKA Bogor

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*), perspektif proses internal (*internal process perspective*), dan perspektif pembelajaran organisasi (*learn and growth perspective*). Sasaran tersebut dicapai melalui indikator kinerja kegiatan seperti pada peta strategi Politeknik AKA Bogor (Gambar 5).



Gambar 5. Peta Strategi Politeknik AKA Bogor Tahun 2020-2024

2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Sasaran Kegiatan 1 (SK1) : **Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas** dengan indikator kinerja kegiatan:

- a. Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 82% menjadi 89% pada tahun 2024
- b. Jumlah tenaga kerja industri yang kompeten pada tahun 2020 sebanyak 1100 orang per tahun menjadi sebanyak 1620 orang per tahun pada tahun 2024.

2.4.2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran Kegiatan 2 (SK2): **Penguatan implementasi making Indonesia 4.0** dengan indikator kinerja kegiatan :

- Implementasi industri 4.0 pada Pendidikan vokasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1 implementasi per tahun

2.4.3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran Kegiatan 3 (SK3) : **Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan** dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat pada tahun 2020 sebanyak 3 perusahaan menjadi 5 perusahaan pada tahun 2024
- b. Jumlah penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional atau internasional pada tahun 2020 sebanyak 10 penelitian menjadi 18 penelitian pada tahun 2024
- c. Nilai minimum akreditasi program studi pada tahun 2020 sebesar 301 menjadi 345 pada tahun 2024
- d. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1 talent setiap tahun

2.4.4. Perspektif *Learn and Growth*

Sasaran Kegiatan 4 (SK4): **Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri** dengan indikator kinerja kegiatan :

- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar 50 menjadi 80 pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan 5 (SK5): **Terwujudnya birokrasi Politeknik AKA Bogor yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima** dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Nilai laporan keuangan Politeknik AKA Bogor pada tahun 2020 sebesar 70 menjadi 78 pada tahun 2024
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 70 menjadi 78 pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan 6 (SK6): **Terwujudnya ASN yang profesional dan berkepribadian** dengan indikator kinerja kegiatan :

- Rata-rata indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 adalah 70 menjadi 80 pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan 7 (SK7): **Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien** dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 91 menjadi 93 pada tahun 2024
- b. Level indeks penerapan manajemen risiko (MRI) ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 3 menjadi sebesar 4 pada tahun 2024

Dari indikator kinerja kegiatan yang telah dijabarkan di atas ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Politeknik AKA Bogor pada rencana strategis tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu 1 tahun setelah kelulusan
2. Implementasi industri 4.0 pada Pendidikan vokasi
3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLITEKNIK AKA BOGOR

Berdasarkan tujuan dan sasaran Politeknik AKA Bogor maka ditetapkan cara untuk mencapainya yaitu arah kebijakan dan strategi Politeknik AKA Bogor sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia uaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industry*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
 - g. pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi;
 - h. pengembangan *smart* dan *cyber campus*; dan
 - i. pengembangan program studi baru.
- 2) Model pembelajaran STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong mahasiswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam

menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.

- 3) Pengembangan pendidikan berstandar global dengan mendorong politeknik/akademi komunitas untuk mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN (*the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics*) melalui empat tahapan, yaitu:
 - a. evaluasi dan sertifikasi institusional;
 - b. *workshop* dan pelatihan; dan
 - c. sertifikasi; serta
 - d. pasca-akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan).

2. Melaksanakan penelitian terapan *problem solving* di *leading sector* industri prioritas.

Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui enam strategi, yaitu:

- 1) Penelitian terapan *problem solving* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu: 1) industri pangan; 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri.
- 2) Implementasi hasil penelitian di industri dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas, serta meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan inovasi teknologi;
 - b. peningkatan mutu dan diversifikasi produk/proses;
 - c. implementasi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa industri untuk IKM; dan
 - d. komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
- 3) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten hasil penelitian.
- 4) Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional.
- 5) Kompetisi nasional untuk inovasi vokasi industri.

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Implementasi arah kebijakan ini dilakukan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Mengembangkan ekosistem industri kecil menengah.
- 2) Membangun kemitraan.

Adapun jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan di politeknik/akademi komunitas antara lain:

- a. pendampingan teknologi;
- b. pelatihan;
- c. pelayanan konsultasi industri; dan
- d. penyuluhan.

4. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PIDI 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

5. Membangun kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi.

Unit pendidikan tinggi di Kemenperin memiliki tugas tidak hanya untuk menciptakan tenaga kerja kompeten, tetapi juga menghasilkan wirausaha industri. Untuk mewujudkan ini, maka perlu dibangun inkubator bisnis yang terintegrasi. Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (*tenant*). *Tenant* inkubator bisnis di perguruan tinggi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah memiliki prospektif usaha. Dalam penyelenggaraannya, politeknik/akademi komunitas perlu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, BDI, asosiasi industri, dan pihak terkait lainnya.

Saat ini seluruh politeknik pendidikan vokasi Kemenperin memiliki program inkubator bisnis dengan beragam spesialisasi komoditi industri yang dikembangkan. Selain itu, berbagai K/L juga memiliki program penyiapan wirausaha yang dapat dikolaborasi. Di Kemenperin sendiri, upaya penciptaan wirausaha baru banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dalam bentuk bimbingan, pendampingan dan bantuan peralatan. Penyelenggaraan inkubator bisnis yang mencakup fase pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi dapat dilakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut.

6. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh politeknik dan akademi komunitas telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan politeknik dan akademi komunitas dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

7. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai standar industri tertentu yang akan langsung bekerja pada industri. Penyiapan kelas industri dilakukan melalui program pendidikan setara D1/D2 dan kelas khusus program pendidikan D3/D4.

3.2. KERANGKA REGULASI

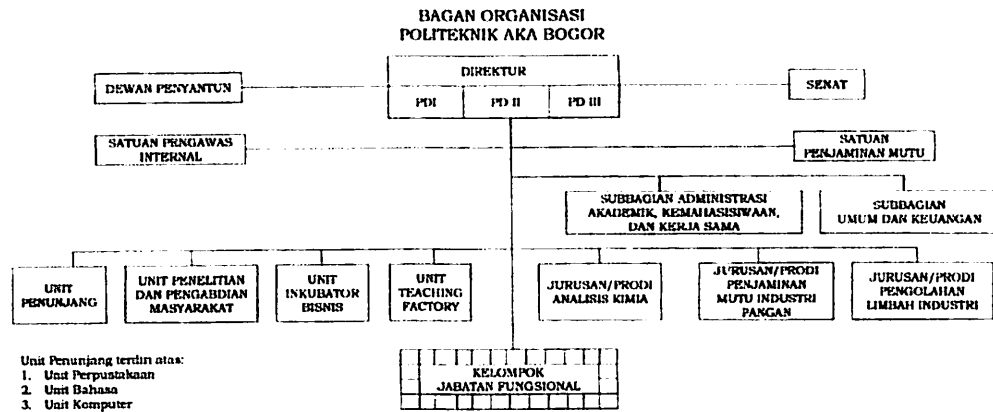
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi Politeknik AKA Bogor tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan Politeknik AKA Bogor. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Regulasi Politeknik AKA Bogor Tahun 2020 – 2024

| No | Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait | Target Penyelesaian |
|----|--|--|---------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Rpermen SKKNI Nanoteknologi | Sebagai dasar penyusunan uji kompetensi prodi Nanoteknologi Pangan | Politeknik AKA Bogor | BSDMI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan | 2022 |
| 2. | Rpermen pembangunan satelit PIDI 4.0 | Penyiapan politeknik sebagai <i>showcase</i> dan <i>capability center</i> industri 4.0 | Politeknik/Akom di bawah BPSDMI | BPSDMI, Kementerian Perindustrian | 2023 |
| 3. | Rpermen pembangunan inkubator bisnis industri yang terintegrasi | Sebagai dasar kerja sama pelaksanaan inkubator bisnis industri | Politeknik/Akom di bawah BPSDMI | BPSDMI, Ditjen IKM, BSKJI, Kementerian Perindustrian, | 2023 |
| 4. | Rpermen pengembangan kelas industri | Sebagai dasar kerja sama untuk pembukaan kelas industri | Politeknik/Akom di bawah BPSDMI | BPSDMI, Industri, Kementerian Perindustrian | 2023 |
| 5 | Keputusan Direktur mengenai penyusunan skema uji kompetensi DIV Nanoteknologi Pangan | Sebagai dasar penyusunan skema uji kompetensi DIV Nanoteknologi Pangan | Politeknik AKA Bogor | BNSP | 2023 |
| 6 | Keputusan Direktur mengenai akreditasi internasional | Sebagai dasar untuk persiapan akreditasi internasional | Politeknik AKA Bogor | BPSDMI | 2025 |

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (struktur organisasi) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi Politeknik AKA Bogor. Kerangka kelembagaan Politeknik AKA Bogor tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 04/M-IND/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kerangka Kelembagaan Politeknik AKA Bogor

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran strategis Politeknik AKA Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target Kinerja Politeknik AKA Bogor Tahun 2020 - 2024

| Kode | Tujuan | Kode IKT | Indikator Kinerja Tujuan | Satuan | Target | | | | |
|--|--|----------|---|--------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tj | Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional | Tj1 | Tersedianya SDM Industri yang kompeten | Orang | 375 | 467 | 385 | 390 | 395 |
| Kode | Sasaran Kegiatan | Kode IKK | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target | | | | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER PERSPECTIVE) | | | | | | | | | |
| SK1 | Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas | IK1.1 | Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan | Persen | 82 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| | | IK1.2 | Tenaga kerja industri yang kompeten | Orang | 1100 | 1664 | 1580 | 1600 | 1620 |
| PERSPEKTIF PELANGGAN (CUSTOMER PERSPECTIVE) | | | | | | | | | |
| SK2 | Penguatan implementasi making Indonesia 4.0 | IK2.1 | Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan vokasi | Implementasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| PERSPEKTIF PROSES INTERNAL (<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>) | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SK3 | Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan | IK3.1 | Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat | Perusahaan | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | IK3.2 | Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional atau internasional | Penelitian | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| | | IK3.3 | Nilai minimum akreditasi program studi | Nilai | 301 | 325 | 345 | 345 | 345 |
| | | IK3.4 | Inkubator bisnis industri yang tumbuh | Talent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI (<i>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</i>) | | | | | | | | | |
| SK4 | Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri | IK4.1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang dan jasa | Persen | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
| SK5 | Terwujudnya birokrasi satker yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | IK5.1 | Nilai laporan keuangan | Nilai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| | | IK5.2 | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi | Nilai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------|----|------|----|------|----|
| | | | pemerintah (SAKIP) | | | | | | |
| SK6 | Terwujudnya ASN yang profesional dan berkepribadian | IK6.1 | Rata-rata indeks profesionalitas ASN | Indeks | 70 | 71 | 73 | 76 | 80 |
| SK7 | Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien | IK7.1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti | Persen | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |
| | | IK7.2 | Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) | Indeks | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik AKA Bogor, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Politeknik AKA Bogor pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4 dan dijabarkan dalam Lampiran 2.

Tabel 4. Kerangka Pendanaan Politeknik AKA Bogor Tahun 2020 - 2024

| Kegiatan | Dana Tiap Tahun (dalam ribuan rupiah) | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem | 36.277.834 | 37.540.289 | 39.996.311 | 41.996.127 | 44.095.933 |

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (renstra) Politeknik AKA Bogor tahun 2020-2024 revisi 2 ini telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Renstra ini berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun (2020 – 2024). Renstra ini menjadi pedoman bagi Politeknik AKA untuk menyusun rencana kinerja tahunan serta menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahunan.

Dengan tersusunnya renstra ini diharapkan :

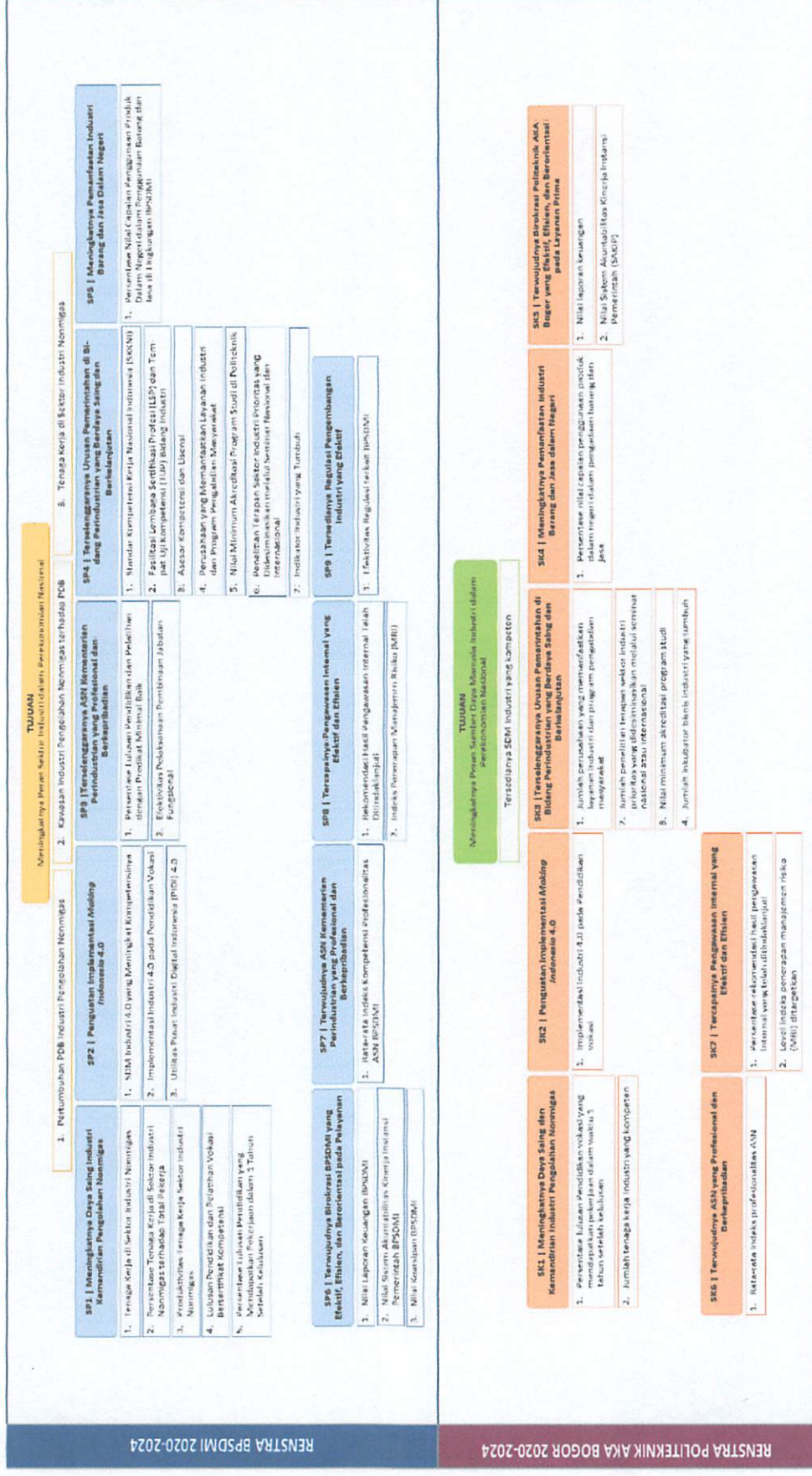
1. Visi Politeknik AKA Bogor dapat tercapai
2. Misi Politeknik AKA Bogor dapat dilaksanakan dengan baik
3. Semua program dan kegiatan sejalan dengan renstra ini
4. Pelaksanaan tupoksi dapat lebih efektif dan efisien

Karena renstra yang disusun ini bersifat dinamis, maka apabila dalam perjalanan waktu terjadi ketidak selarasan terhadap kondisi yang ada, maka renstra ini harus segera diubah, disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Akhirnya semoga renstra ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Politeknik AKA Bogor dalam mengembangkan Politeknik AKA Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pohon Kinerja Politeknik AKA Bogor Tahun 2020 – 2024



Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Politeknik AKA Bogor

| Kode | Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK | | Satuan | Target Baru | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Terkait |
|-----------------------------|--|---|--------------|-------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| POLITEKNIK AKA BOGOR | | | | | | | | | 36,277,834 | 37,540,289 | 39,996,331 | 41,996,127 | 44,095,933 | |
| TJ | Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Tersedianya SDM Industri yang Kompeten | Orang | 375 | 467 | 385 | 390 | 395 | 25,907,162 | 26,441,956 | 27,913,121 | 29,308,777 | 30,774,216 | Semua Unit |
| SK1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan | Persen | 82 | 82 | 84 | 87 | 89 | 607,000 | 638,951 | 672,580 | 706,209 | 741,519 | Prodi, BAAKK, CDC |
| | 2 | Tenaga kerja industri yang kompeten | Orang | 1100 | 1664 | 1580 | 1600 | 1620 | 5,575,371 | 5,849,720 | 6,200,757 | 7,016,762 | 7,849,037 | Prodi, BAAKK, LSP, TUK |
| SK2 | Penguatan implementasi making Indonesia 4.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan vokasi | Implementasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Prodi |
| SK3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat | Perusahaan | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 320,000 | 424,000 | 424,000 | 402,800 | 382,660 | PPM dan Inkubis |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 2 | Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional atau internasional | Penelitian | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 859,920 | 950,000 | 1,138,050 | 1,081,148 | 1,027,090 | PPM dan Prodi |
| | 3 | Nilai minimum akreditasi program studi | Nilai | 301 | 325 | 345 | 345 | 345 | 46,800 | 46,800 | 267,436 | 254,064 | 241,361 | Prodi dan SPM |
| | 4 | Inkubator bisnis industri yang tumbuh | Talent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49,820 | 49,820 | 49,820 | 47,329 | 44,963 | Inkubis dan PPM |
| SK4 Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang dan jasa | Persen | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 2,020,057 | 2,136,900 | 2,249,368 | 2,136,900 | 2,030,055 | PPK dan Pengadaan |
| SK5 Terwujudnya Birokrasi Satker yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Nilai laporan keuangan | Nilai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 62,540 | 68,640 | 88,640 | 84,208 | 79,998 | Keuangan dan Aset |
| | 2 | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) | Nilai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 6,840 | 6,498 | Keuangan dan Aset |
| SK6 Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Rata-rata indeks profesionalitas ASN | Indeks | 70 | 71 | 73 | 76 | 80 | 458,164 | 531,172 | 559,129 | 531,173 | 504,614 | Baum |

| SK7 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----|------|----|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti | Persen | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 53,800 | 56,700 | 87,800 | 83,410 | 79,240 | SPI, Keuangan, dan Aset |
| 2 | Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) | Indeks | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10,000 | 38,430 | 38,430 | 36,509 | 34,683 | SPI, Keuangan, dan Aset |

Lampiran 3. Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis

| Struktur Data | Kode | Nomenklatur | Unit Terkait | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Politeknik AKA Bogor | | | | | | | | | |
| Sasaran Strategis | SS1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS1.8 | Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi | Pusdiklat Industri | Orang | 17.000 | 43.000 | 27.600 | 95.000 | 100.000 |
| Sasaran Program | SP1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | BPSDMI | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK1 | Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK1.1 | Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan | Politeknik AKA Bogor | Persen | 82 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK1.2 | Tenaga kerja industri yang kompeten | Politeknik AKA Bogor | Orang | 1100 | 1664 | 1580 | 1600 | 1620 |
| Sasaran Strategis | SS2 | Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS2.5 | SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya | Pusdiklat SDM Industri | Orang | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sasaran Program | SP2 | Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | BPSDMI | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK2 | Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK2.1 | Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi | Politeknik AKA Bogor | Implementasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sasaran Strategis | SS3 | Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS3.1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin | Semua Unit Eselon I | Persen | - | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Sasaran Program | SP5 | Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | BPSDMI | | | | | | |

| Struktur Data | Kode | Nomenklatur | Unit Terkait | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------------|---|------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sasaran Kegiatan | SK4 | Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK4.1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI | Politeknik AKA Bogor | Persen | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Sasaran Strategis | SS8 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS8.2 | Infrastruktur kompetensi industri | Pusdiklat SDM Industri | SKKNI | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sasaran Program | SP4 | Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri | BPSDMI | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK3.1 | Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat | Politeknik AKA Bogor | Perusahaan/ Industri | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK3.2 | Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional | Politeknik AKA Bogor | Penelitian | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK3.3 | Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik | Politeknik AKA Bogor | Nilai | 301 (B) | 325 (B) | 345 (B) | 345 (B) | 345 (B) |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK3.4 | Inkubator industri yang tumbuh | Politeknik AKA Bogor | Tenant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sasaran Strategis | SS9 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS9.2 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | Semua Unit Eselon I | Persen | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |
| Sasaran Program | SP8 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | BPSDMI | | | | | | |

| Struktur Data | Kode | Nomenklatur | Unit Terkait | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sasaran Kegiatan | SK7 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK7.1 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti | Politeknik AKA Bogor | Persen | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |
| Indikator Kinerja Program | IK7.2 | Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) | Politeknik AKA Bogor | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sasaran Strategis | SS10 | Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS10.1 | Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin | Set BPSDMI | Indeks | 70 | 71 | 73 | 76 | 80 |
| Sasaran Program | SP7 | Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK6 | Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK6.1 | Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Politeknik AKA Bogor | Politeknik AKA Bogor | Indeks | 70 | 71 | 73 | 76 | 80 |
| Sasaran Strategis | SS12 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS12.1 | Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN | Setjen | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Sasaran Program | SP7 | Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | BPSDMI | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK5 | Terwujudnya birokrasi Satker yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |

| Struktur Data | Kode | Nomenklatur | Unit Terkait | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK5.1 | Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri | Politeknik AKA Bogor | Nilai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sasaran Strategis | SS13 | Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SS | SS13.2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian | Seluruh Eselon II | Nilai | 78 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,8 |
| Sasaran Program | SP7 | Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | BPSDMI | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK5 | Terwujudnya birokrasi Satker yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | Politeknik AKA Bogor | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | IK5.2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri | Politeknik AKA Bogor | Nilai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |

Lampiran 4. PEDOMAN KINERJA RENSTRA POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN 2020—2024

1. Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | | | | | | |
| IK1.1 | Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan | 82 | 82 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. | | | | | | | |
| Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK). Outputnya berupa jumlah lulusan. Lulusan yang terserap meliputi yang bekerja di industri, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. | | | | | | | |
| Presentase lulusan yang terserap ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Prosentase lulusan yang terserap dihitung paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1). | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data prosentase lulusan tahun sebelumnya dari masing-masing satuan kerja Pendidikan. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Jumlah lulusan yang terserap dibagi jumlah seluruh lulusan pada tahun sebelumnya dikali 100%. | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Persen | | Maksimasi | | CDC | | | |

2. Tenaga kerja industri yang kompeten

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | | | | | | |
| IK1.2 | Tenaga kerja industri yang kompeten | 1166 | 1100 | 1664 | 1580 | 1600 | 1620 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK) yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Indikator kinerja jumlah tenaga kerja industri yang kompeten dihitung dari jumlah peserta didik aktif tersebut pada akhir tahun ajaran dari setiap satuan kerja Pendidikan. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data pada sistem informasi akademik peserta didik masing-masing satuan kerja. | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Orang | | Maksimasi | | Bagian Kemahasiswaan | | | |

3. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK2 | Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> | | | | | | |
| IK2.1 | Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan re-skilling dan upskilling tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan Pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan Pendidikan. | | | | | | | |
| Jenis-jenis implementasi industry 4.0 Pada Pendidikan vokasi adalah sebagai berikut: | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Satelit PIDI 2. Implementasi Kurikulum industri 4.0 3. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada Pendidikan 4. Pelatihan Industri 4.0 pada SDM Industri. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data implementasi industri 4.0 pada satuan kerja | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Jumlah implementasi | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Implementasi | | Maksimasi | | Pembantu Direktur I | | | |

4. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|--|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | | | | | | |
| IK3.1 | Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat | NA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem industri, dilakukan kerja sama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini menjadi kebijakan penting bagi unit pendidikan dalam rangka untuk: | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan; 2. pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret; 3. mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai. | | | | | | | |
| Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industry pada Unit Pendidikan adalah sebagai berikut: | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan teknologi; 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pelayanan konsultasi industry; 4. Penyuluhan; 5. Pemanfaatan Workshop/Laboratorium/Teaching Factory. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan unit kerja Pendidikan. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan unit kerja Pendidikan di akhir tahun | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Perusahaan/Industri | | Maksimasi | | Pembantu Direktur I | | | |

5. Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didiseminasikan melalui seminar nasional dan internasional

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|--|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | | | | | | |
| IK3.2 | Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didiseminasikan melalui seminar nasional dan internasional | NA | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| <p>Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.</p> <p>Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industry Revolution (4IR) yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.</p> <p>Target penerapan hasil penelitian oleh Politeknik dan Akademi Komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional / internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi / bereputasi internasional.</p> | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data Artikel penelitian yang sudah terpublikasi. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Jumlah data artikel penelitian yang sudah terpublikasi. | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Publikasi Penelitian | | Maksimasi | | PPM | | | |

6. Nilai minimum akreditasi program studi

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|---|--------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | | | | | | |
| IK3.3 | Nilai minimum akreditasi program studi | C | 301 (B) | 325 (B) | 345 (B) | 345 (B) | 345 (A) |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| <p>Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya.</p> <p>Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik adalah nilai terkecil dari beberapa Nilai akreditasi program studi yang terdapat pada satker dan masih berlaku.</p> | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan (SK) dari Lembaga akreditasi | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Nilai terkecil dari beberapa Nilai akreditasi program studi | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Nilai | | Maksimasi | | Pembantu Direktur I | | | |

7. Inkubator bisnis industri yang tumbuh

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|--|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | | | | | | |
| IK3.4 | Inkubator Bisnis industri yang tumbuh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| <p>Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada balai diklat dan Pendidikan tinggi adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha.</p> <p>Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di balai diklat dan Pendidikan tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pra Inkubasi 2. Tahap Inkubasi 3. Tahap Pasca Inkubasi <p>Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun mulai dari awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan.</p> | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Jumlah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Tenant | | Maksimasi | | Inkubator Bisnis | | | |

8. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK4 | Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri | | | | | | |
| IK4.1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Politeknik AKA Bogor | NA | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| <p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.</p> | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| <p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: $RP_{3DN} = \frac{RAP_{3DN}}{TotAP_{3DN}}$</p> <p>Ket:</p> <p>$RP_{3DN}$ = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin</p> <p>RAP_{3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p>$TotAP_{3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Persen | | Maksimasi | | Bagian Pengadaan | | | |

9. Nilai laporan keuangan

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK5 | Terwujudnya birokrasi Satker yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | | | | | | |
| IK5.1 | Nilai Laporan Keuangan | NA | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan kementerian Perindustrian. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiroam E Rekon). | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Nilai | | Maksimasi | | Bagian Keuangan dan Aset | | | |

10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2018 | Target | | | | |
|--|--|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK5 | Terwujudnya birokrasi Satker yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | | | | | | |
| IK5.2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Data Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Persen | | Maksimasi | | Pembantu Direktur II | | | |

11. Rata-rata indeks profesionalitas ASN

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK6 | Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian | | | | | | |
| IK6.1 | Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN | NA | 70 | 71 | 73 | 76 | 80 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Indeks | | Maksimasi | | Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |

12. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|---|--------------------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK7 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | | | | | | |
| IK7.1 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 90 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, <i>database</i> Itjen | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. | | | | | | | |
| SATUAN | | KLASIFIKASI | | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | |
| Persen | | Maksimasi | | Pembantu Direktur II | | | |

13. Indeks penerapan manajemen risiko (MRI)

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|---|------------------------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SP7 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | | | | | | |
| IK7.2 | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) | NA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| DEFINISI/DESKRIPSI | | | | | | | |
| <p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p> | | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP. | | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG (FORMULA) | | | | | | | |
| Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. | | | | | | | |
| SATUAN | KLASIFIKASI | PENANGGUNG JAWAB DATA | | | | | |
| Level | Maksimasi | SPI | | | | | |